

Ramai Dikunjungi, Rumput Alun-alun Kota Bogor Rusak

BOGOR (IM)-Kondisi rumput di Lapangan Alun-alun Kota Bogor mengalami kerusakan. Di beberapa area tampak terkikis dan botak. Hal ini disebabkan karena tingkat kunjungan ke Alun-alun Kota Bogor sangat tinggi pada libur Idul Fitri 2024 ini.

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim) Kota Bogor, Rr. Juniarti Estiningsih mengatakan, hal tersebut terjadi lantaran tingginya kunjungan wisatawan Alun-alun Kota Bogor di momen libur lebaran.

“Ya, banyak warga yang datang dan menggelar tikar di sekitar area Alun-alun Kota Bogor sehingga membuat kondisi rumput rusak. Bukan saja warga Kota Bogor tapi juga warga luar Kota Bogor. Mereka menggelar tikar dan sebagainya. Kemarin selama hari Sabtu dan Minggu dilos makanya seperti itu,” ungkap Esti, Selasa (16/4).

Esti memaparkan, dirinya berjanji akan segera melakukan pemeliharaan pada area rumput

di Alun-alun Kota Bogor, agar area itu dapat kembali hijau seperti semula.

“Hal itu akan berdampak pada ditutupnya sejumlah ruang terbuka yang ada di Alun-alun. Karena perlu maintenance jadi akan ditutup sementara pada bagian rumputnya. Mungkin sejak hari ini sampai Jumat mendatang, Hari Sabtu dan Minggunya akan dibuka,” paparnya.

Esti menjelaskan, selain area rumput, dirinya berjanji juga akan memelihara kembali toilet-toilet di Alun-alun Kota Bogor karena selama ini telah banyak digunakan oleh para wisatawan.

“Kepada warga dan wisatawan untuk senantiasa berpartisipasi menjaga tanaman dan sarana prasarana yang ada di Alun-alun Kota Bogor sehingga dapat terus terawat dan tidak rusak,” pungkasnya. ●jay

Asmawa Tosepu Evaluasi SKPD yang ‘Pelan’ Serapan Anggarannya

CIBINONG (IM)-Serapan anggaran masih rendah. Karenanya, Penjabat Bupati Bogor, Asmawa Tosepu pun menegur beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Hal itu dikatakan Asmawa Tosepu saat memimpin apel upacara bersama Sekretariat Daerah, pimpinan SKPD, Camat dan Lurah, Selasa (16/4).

“Saya minta percepatan penyerapan anggaran yang saat ini di bawah 35 persen, kepada SKPD yang serapan anggarannya ‘berjalan pelan’ untuk bisa ‘berjalan kencang,’” kata Asmawa Tosepu kepada wartawan.

Pria berusia 49 tahun ini menuturkan agar rencana kerja yang sudah tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 untuk segera direalisasikan.

“Rencana kerja yang tertuang dalam APBD segera

dilaksanakan, karena hal itu ‘urat nad’ pemerintahan daerah dan demi kemaslahatan masyarakat Kabupaten Bogor,” tuturnya.

Asmawa meminta percepatan agar serapan anggaran sesuai dengan rencana kerja, segera dilakukan percepatan lelang pengadaan barang dan jasa.

“Hasil analisa dan evaluasi, belum maksimalnya serapan anggaran karena masih dalam proses lelang pengadaan barang dan jasa. Tak hanya cepat, saya meminta pelaksanaan penyerapan anggaran sesuai aturan dan undang-undang yang berlaku,” pintanya. Bogor

Asmawa Tosepu melanjutkan bahwa selain pimpinan SKPD, ia juga akan mengevaluasi kinerja jajaran SKPD yang ‘berjalan pelan’ karena dirinya menginginkan percepatan penyerapan anggaran. ●gio

8 | Nusantara



HALAL BIHALAL DI LINGKUNGAN KERJA PEMKOT BOGOR

Wali Kota Bogor Bima Arya (tengah) bersama istri Yane Ardian (kedua kiri) dan Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim (kiri) bersalaman dengan sejumlah ASN di lingkungan kerja Pemkot Bogor saat acara halal bihalal di pelataran Asmaul Husna, Alun-Alun Kota Bogor, Jabar, Selasa (16/4). Pemkot Bogor menggelar acara halal bihalal dengan tema Silaturahmi Tanpa Henti dan Supaya Bogor Terus Berlari pada hari pertama kerja setelah libur Lebaran.

Asmawa Tosepu Perintahkan Jajarannya Tertibkan Bangunan yang Rawan Bencana

Kabupaten Bogor sangat rawan bencana, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Camat, Lurah dan Kades untuk waspada. Data dan tertibkan bangunan yang berada di wilayah rawan bencana seperti sepadan sungai, sepadan jalan atau tebing karena hal itu bagian dari mitigasi kebencanaan, kata Asmawa Tosepu.

CIBINONG (IM)-Rasio kebencanaan alam maupun non alam di Kabupaten Bogor sangat tinggi, bahkan dari 365 hari dalam setahun, hanya 10 hari yang tidak terjadi peristiwa bencana. Penjabat Bupati Bogor,

Asmawa Tosepu pun meminta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis, Camat, Lurah dan Kepala Desa (Kades), untuk melakukan upaya pencegahan atau mitigasi bencana.

“Kabupaten Bogor ini

sangat rawan bencana, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Camat, Lurah dan Kades untuk waspada. Data dan tertibkan bangunan yang berada di wilayah rawan bencana seperti sepadan sungai, sepadan jalan atau tebing karena hal itu bagian dari mitigasi kebencanaan,” pinta Asmawa Tosepu kepada wartawan, Selasa (16/4).

Selain itu, Asmawa Tosepu berharap kejadian bencana alam maupun non alam ‘menghantui’ kita hingga memecut jajarannya untuk bekerja lebih baik lagi.

“Jangan sampai nanti terjadi bencana, kita baru kasak-kusuk. Potensi bencana alam maupun non alam

harus ‘menghantui’ agar kita bekerja lebih baik lagi agar masyarakat selamat dari kejadian bencana,” harunya.

Ia pun meminta Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah (Bappedalitbang) segera merealisasikan revisi Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

“Semoga revisi Perda RTRW segera bisa disetujui oleh Pemprov Jawa Barat dan disahkan, sehingga dijadikan rujukan pemanfaatan ruang yang baik dan sesuai peraturan yang berlaku,” pinta Asmawa Tosepu.

Kabid Penataan Bangunan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor, Riza Juangshah Rahmat mengatakan akan melakukan

pendataan bangunan yang berdiri diatas sepadan sungai maupun sepadan jalan.

“Saya akan berkoordinasi dengan UPT Tata Bangunan, kami akan tertibkan bangunan yang melanggar sepadan sungai dan sepadan jalan, terutama bangunan yang komersil,” kata Riza Juangshah Rahmat.

Riza Juangshah Rahmat menjelaskan tidak mungkin semua rumah tinggal yang melanggar sepadan sungai dan sepadan jalan ditertibkan atau dibongkar.

“Kalau rumah tinggal kita harus menyediakan lahan pengganti, hingga penertiban atau pembongkarnya harus ada pertimbangan seperti apakah di lahan tersebut memang benar-benar membahayakan penghuninya,” jelasnya. ●gio



KEPADATAN KENDARAAN HARI PERTAMA KERJA DI DEPOK

Pengendara terjebak kemacetan di Jalan Raya Margonda, Depok, Jawa Barat, Selasa (16/4). Pada hari pertama kerja usai libur nasional dan cuti bersama Lebaran di sebagian ruas jalan di Depok menuju ibu kota Jakarta mengalami kepadatan kendaraan.

Satpol PP Kota Bogor Awasi PKL Seusai Penertiban di Jalan Dewi Sartika

KOTA BOGOR (IM)-Satpol PP Kota Bogor, Jawa Barat, mengawasi dan memantau pedagang kaki lima (PKL) yang direlokasi dari jalur pedestrian Jalan Dewi Sartika ke selasar Pasar Kebon Kembang.

Kepala Satpol PP Kota Bogor, Agustian Syach mengatakan, dari hasil pendataan sementara total ada 126 pedagang yang ditertibkan. Sebagian besar diantaranya merupakan pedagang buah.

“Ya kita akan awasi. Monitor, sambil lihat perkembangan mereka untuk pindah ke lokasi itu,” kata Agustian di Kota Bogor, kemarin.

Agustian mengatakan, pihaknya masih mencari lokasi yang pas untuk memindahkan pedagang lainnya. Sebab tidak semua di antaranya merupakan pedagang buah.

“Tapi setelah kita data, sebagian dari mereka punya kios di dalam Blok C, D sebenarnya. Jadi kita akan kurasi dulu, mana yang punya kios, mana tidak,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor konsisten untuk merelokasi para PKL.

Menurutnya, penertiban ini merupakan bagian dari penataan PKL di Kota Bogor.

Agustian menjelaskan, penataan PKL ini bukan hanya soal penertiban. Tapi termasuk juga rekondisi dan relokasi.

“Mudah-mudahan mereka bisa bertahan di situ. Tapi kalau mereka balik lagi, ya kita akan terus tertibkan. Karena tiga syarat penataan sudah dilaksanakan Pemkot Bogor,” ujarnya.

Pemkot menertibkan dan merelokasi pedagang kaki lima (PKL) dari jalur pedestrian Jalan Dewi Sartika ke selasar Pasar Kebon Kembang.

Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto mengatakan Pemkot Bogor akan melakukan pendekatan kepada PKL yang sebagian besar merupakan pedagang buah, agar para PKL mau bergeser.

“Dipindahkan antara di pasar Blok A, B, dan F, itu untuk pedagang buahnya. Di sana akan dirapikan dan nanti pedagang akan ditempatkan di sana,” kata Bima. ●jai

ASN yang Cawe-cawe di Pilkada, Boleh Jadi Timeses Asal Cuti

CIBINONG (IM)-Usai Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg), masyarakat, ASN dan Pegawai Pemkab Bogor akan menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) baik itu Pemilihan Bupati (Pilbup) Bogor maupun Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat.

Penjabat Bupati Bogor, Asmawa Tosepu pun mengingatkan agar para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai Pemkab Bogor untuk tidak cawe-cawe di dua ajang pesta demokrasi lokal tersebut.

“Kita akan menghadapi Pilbup Bogor dan Pilgub Jawa Barat, jangan cawe-cawe, terutama ASN maupun pegawai yang tidak bertugas dan terlibat di kePemiluan atau sebagai penyelenggara. Silahkan menggunakan hak pilihnya dan mendukung calon

kepala daerahnya, asalkan simpan dalam hati,” kata Asmawa Tosepu kepada jajaran ASN dan Pegawai Setda Kabupaten Bogor, Senin (16/4).

Asmawa Tosepu menuturkan agar para ASN atau pegawai Pemkab Bogor, tidak menjadi tim sukses pasangan Calon Bupati maupun Calon Wakil Bupati Bogor serta pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Jawa Barat.

“Jangan sampai kalian jadi tim sukses (Timeses), apalagi sampai manjat pohon untuk memasang baliho spanduk pasangan Calon Kepala Daerah. Jaga marwah bapak atau ibu sebagai ASN,” tutur Asmawa Tosepu.

Andaipun ASN ataupun pegawai Pemkab Bogor ingin menjadi Timeses, ia menyarankan agar mereka mengambil cuti dari

tugas dan jabatannya.

“Saya dulu pernah jadi Timeses, tapi saya ambil cuti dari tugas dan jabatan. Saya akan berikan hak cuti bapak atau ibu yang ingin menjadi Timeses pasangan calon kepala daerah yang bakal kalian dukung,” papar mantan Penjabat Wali Kota Kendari tersebut.

Ia melanjutkan akan memberikan sanksi tegas tanpa pandang bulu dan beban dalam menjalankan tugasnya sebagai Penjabat Bupati Bogor, kepada ASN atau pegawai Pemkab Bogor yang cawe-cawe dalam perhelatan Pilbup Bogor maupun Pilgub Jawa Barat.

“Hari ini saya sudah mengingatkan, jadi jika di kemudian hari terjadi pelanggaran, maka saya sudah mengingatkan bakal memberikan sanksi tegas sesuai peraturan dan undang-undang yang berlaku,” tegas Asmawa Tosepu. ●gio



OPERASI SIMPATIK SADAR ADMINDUK

Petugas Disdukcapil Kota Bandung melakukan pencatatan kependudukan kepada penumpang yang baru turun dari bus di Terminal Cicaheum, Bandung, Jabar, Selasa (16/4). Disdukcapil Kota Bandung menggelar Operasi Simpatik sadar administrasi kependudukan (Adminduk) di tiga titik di Kota Bandung guna menghimbau para pendatang ke Kota Bandung untuk membuat Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) selama enam bulan.

Ikut Maju Pilkada Periode 2024-2029, Bupati Imron Sudah Mendaftarkan Diri

CIREBON (IM)-Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Cirebon membuka pendaftaran calon bupati Cirebon dan gubernur Jabar untuk periode 2024-2029. Salah satunya yang maju dalam pilkada bupati itu adalah petahana, Bupati Cirebon Imron.

“Alhamdulillah, saya sudah mendaftarkan diri sebagai calon bupati untuk periode 2024-2029. Persyaratan sudah dikasihkan ke panitia di Kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cirebon, tinggal menunggu langkah berikutnya,” kata Imron kepada wartawan, Selasa (16/4).

Sebelumnya, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Cirebon membuka pendaftaran tersebut. Pendaftaran calon bupati Cirebon dan Gubernur Jabar terbuka untuk umum. Dibuka sejak tanggal 2 April hingga 20 April 2024.

Tidak hanya internal partai, tapi juga eksternal partai yang bisa mendaftarkan diri untuk maju pilkada tersebut. Bahkan, sejumlah tokoh sudah banyak yang mengambil formulir pendaftaran. Di antaranya, petahana Bupati Imron, akademisi Sopidi, politisi Yoga Setiawan dan Ajat Sudrajat.

Bendahara DPC PDI Perjuangan, Rudyana membenarkan

nama-nama tersebut sudah mengambil formulir. Namun, yang sudah menyerahkan formulir pendaftaran sebagai tanda keseriusan daftar sebagai calon bupati baru Bupati Imron.

Dijelaskannya, batas akhir pendaftaran di DPC PDI Perjuangan hingga 20 April 2024. Setelah itu, DPC PDI Perjuangan akan menyerahkan nama-nama yang sudah daftar ke DPD PDI Perjuangan Jawa Barat.

Pendaftaran calon bupati, wakil bupati Cirebon dan Gubernur Jabar juga bisa dilakukan melalui DPD PDI Perjuangan Jawa Barat. Pendaftaran akan menjalani fit and proper test, pendalaman, dan verifikasi syarat-syarat yang telah ditetapkan.

Sementara itu, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cirebon, H Imron mengatakan, siapa pun yang berminat menjadi bupati, wakil bupati Cirebon hingga gubernur Jabar bisa mendaftar. Karena, pendaftaran berlaku untuk internal dan eksternal.

“Dibuka untuk umum, tidak hanya pengurus dan anggota partai, masyarakat bisa ikut mendaftar,” kata Imron.

Disinggung soal dirinya mendaftar lagi sebagai calon Bupati Cirebon, Imron mengatakan, sudah ikut mendaftar sebagai calon Bupati Cirebon. “Tinggal menunggu langkah berikutnya,” katanya. ●pra